



Safruddin Asra: Harus Sentuh Kebutuhan Rakyat

■ DPRD Mempawah Bahas RPJMD 2025-2029



IST/DPRD

TANDA TANGAN - Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra menandatangani Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin 4 Agustus 2025 sore.

MEMPAWAH, TRIBUN

- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin 4 Agustus 2025 sore.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, serta dihadiri Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi, Sekda Mempawah Ismail, para anggota dewan, dan sejumlah kepala OPD.

Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal arah pemba-

ngunan tersebut.

"RPJMD ini harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas. DPRD akan memastikan program yang dirumuskan berpihak kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan," tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan. "Kami akan terus mengawal agar implementasi RPJMD berjalan sesuai target, sehingga pembangunan di Mempawah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tutup Safruddin.

Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Mempawah

terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin 4 Agustus 2025 sore.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, dengan dihadiri Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, Sekda Mempawah Ismail, para anggota DPRD, dan sejumlah kepala OPD.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Juli Suryadi menyampaikan bahwa RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Peraturan daerah ini wajib ditetapkan paling lambat

enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Untuk Mempawah, tenggat waktunya jatuh pada 20 Agustus 2025," jelasnya.

Juli menambahkan, RPJMD 2025-2029 menjadi penjabaran visi, misi, strategi, dan arah kebijakan kepala daerah yang mendukung pencapaian Asta Cita dalam RPJMN serta selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

"Dokumen ini tidak lahir begitu saja. Proses penyusunannya melibatkan diskusi, forum koordinasi, dan konsultasi publik agar benar-benar sesuai kebutuhan pembangunan daerah," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak legislatif dan seluruh stakeholder. **(ram)**